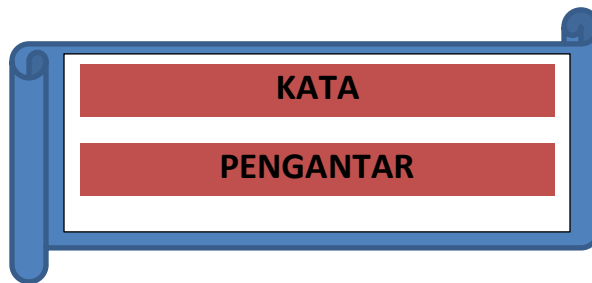


LAPORAN KINERJA



BPBD -2021

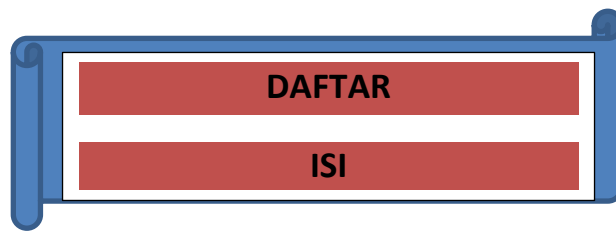


Puji syukur tidak lupa kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perlindunganNya sehingga sepanjang tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai (BPBD) dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan baik. Sepanjang tahun 2021, kami telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang professional dan berkinerja tinggi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan memberikan keterangan atas pencapaian kinerja tahun 2019. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai agar fungsi dan tugas dapat dilakukan dengan baik dan keberadaan kami lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Kami juga selalu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Ruteng, Pebruari 2021



Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum BPBD Kab. Manggarai
- 1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.4. Permasalahan Utama
- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

- 3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2. Realisasi Anggaran

- 3.2.1 Target dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- 3.2.2 Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis
- 3.2.3 Efisiensi Penggunaan Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 1) Matriks Renstra
- 2) Rencana kinerja
- 3) Perjanjian Kinerja
- 4) Pengukuran Kinerja
- 5) Lain-lain yang dianggap perlu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan, Capaian kinerja pada Tahun anggaran 2021 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 7 indikator. Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran. Hasil capaian kinerja Sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan. Secara keseluruhan keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan stakeholder. Disamping itu ada beberapa indikator yang tidak tercapai, ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi baik dari pusat sampai kedaerah yaitu merebaknya wabah virus corona (covid 19) yang melanda seluruh Indonesia, sehingga sebagian anggaran daerah diperuntukan untuk percepatan penanganan Covid 19.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	sasaran	Indikator	Target Tahun 2021	Jumlah Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021
1.	Mitigasi	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Bencana	80 orang	20.769.000	20.669.000
		Jumlah Lokasi Rawan Bencana Yang Terpasang Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana	10 buah	43.259.000	43.034.500
2.	Tanggap Darurat	% Jumlah Lokasi Bencana Yang Teridentifikasi	12 kec	207.565.648	205.569.020
		% Jumlah Bantuan Bencana Yang Terdistribusi	12 kec	82.134.000	82.134.000
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya	Jumlah Dokumen Yang Terdata Dengan Baik	22 orang	1.000.000	1.000.000
		Jumlah dokumen aset	1 dok		
		Jumlah laporan keuangan	1 dok		

Dari 7 indikator kinerja sasaran yang di ukur capaian kinerjanya yaitu mencapai target atau 100 %.

Besarnya alokasi anggaran belanja langsung dalam APBD Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.347.344.126 (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu serratus dua puluh enam rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.255.615.244 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dengan serapan keuangan 96,09% dan fisik 100%.

Berdasarkan dokumen rencana yang ditetapkan berkaitan dengan kebijakan program dan kegiatan, maka pada tahun anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 2 program dan 19 kegiatan.

Tabel
Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Pada Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Daerah	2.347.344.126	2.255.615.244	96,09
2.	Belanja Operasi	2.297.884.126	2.206.396.744	
	Belanja Pegawai	1.650.007.778	1.626.465.644	98,57
	Belanja Barang dan Jasa	647.876.348	579.931.100	89,51
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
3.	Belanja Modal	49.460.000	49.218.500	99,51
Total		2.347.344.126	2.255.615.244	96,09



1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai menyusun LAKIP Tahun 2021 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021, dapat mempertanggungjawabkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai kepada Bupati Manggarai dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai

1.2. Gambaran Umum BPBD Kab. Manggarai

Upaya penanggulangan bencana di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Manggarai pada khususnya memasuki babak baru dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan amanat undang – undang tersebut telah ditindak lanjuti dengan 3 (tiga) buah Peraturan Pemerintah yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang, Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang, Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai merupakan salah satu unit teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai, dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dengan maksud agar penanganan Bencana dapat dilaksanakan lebih terkonsentrasi dan lebih professional.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sebagai jawaban atas kondisi wilayah Kabupaten Manggarai yang memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan pada saat terjadi bencana serta pemulihan pasca bencana.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 tahun 2009 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai bertugas "menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi, Rekonstruksi dan tugas Kesekretariatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan".

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- (1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik serta rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- (2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- (4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- (5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- (6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat pada kondisi darurat bencana;
- (7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- (8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (10) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah maka struktur Organisasi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai yaitu : (terlampir)

1.4. Permasalahan Utama

- a. Sebagian besar (70,45%) Wilayah kabupaten Manggarai berada pada kemiringan diatas 40 derajat;
- b. Curah hujan yang tinggi yaitu 9 (sembilan) bulan basah dan 3 (tiga) bulan kering, yang menyebabkan banjir dan tanah longsor;
- c. Abrasi pantai yang cukup tinggi;
- d. Gunung api gunung anak Ranaka yang masih aktif;
- e. Penebangan hutan secara liar/ illegal logging;
- f. Kabupaten Manggrai termasuk dalam kawasan Circum-pasifik sehingga memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan);
- g. Kabupaten Manggarai memiliki kondisi topografi sebagian besar wilayahnya yakni sekitar 73,01% berada pada ketinggian antara 100-1000 meter diatas permukaan laut;

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.6. Gambaran Umum Kebencanaan

a. Gempa Bumi

Bencana yang dapat timbul oleh gempa bumi adalah : berupa kerusakan atau kehancuran bangunan (rumah, sekolah, rumah sakit, dan bangunan umum lainnya), dan konstruksi prasarana fisik (jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan laut/udara, jaringan listrik dan telekomunikasi, dll), serta bencana sekunder yaitu kebakaran dan korban akibat timbulnya kepanikan. Daerah yang berpotensi terhadap bencana gempa bumi adalah : seluruh wilayah Kabupaten Manggarai.

b. Tsunami/Gelombang Pasang

Tsunami adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi dilaut, letusan gunung api bawah laut. Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebagian wilayahnya berada di pesisir pantai dan berpotensi terhadap bencana tsunmai yaitu :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kecamatan Reok	Kelurahan Reok, Salama, Baru, Mata Air Wangkung, Robek, Lemarang dan Paralando
2	Kecamatan Satar Mese	Tal, Paka, Legu, dan Langgo
3	Kecamatan Satar Mese Barat	Desa Borik, Satar Ruwuk, Nuca Molas, Satar Lenda, Satar Luju, Ceka Luju dan Terong

c. Gunung Api

Kabuupaten Manggarai memiliki satu gunung api yang masih aktif yaitu Gunung Api Gunung Anak Ranaka terletak sekitar 10 km arah Timur dari ibu kota Kabupaten Manggarai dan pernah meletus pada tahun 1987, daerah yang rawan bencana gunung api yaitu Kecamatan Wae Rii, merupakan kecamatan yang terkena secara langsung terutama desa Satar Ngkeling, desa Golo Cador, desa Golo Mendo, desa Wae Rii dan desa Ranaka. Sedangkan kecamatan Satar Mese, Kecamatan Langke Rembong, kecamatan Cibai dan kecamatan Ruteng merupakan wilayah yang terkena dampak langsung.

d. Bencana Banjir

Kabupaten Manggarai memiliki cukup banyak sungai yang berpotensi banjir yaitu :

No	Sungai	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Sungai Wae Kuli	Reok	Desa Toe, Lemarang, dan Desa Paralando
2	Sungai Wae Mbeak	Reok	Desa bajak, Watu Tango dan Ruis
3	Sungai Wae Kaap	Reok	Sebagian desa Ruis, wangkung, dan mata air
4	Sungai Wae Pesi	Reok	Desa Bajak Reo, Mata Air, Baru, salama
		Cibal	Wae Renca
		Rahong Utara	Liang Bua dan Manong
5	Sungai Wae Renca	Cibal	Riung dan Wae Renca
6	Sungai Wae Mese	Satar Barat	Hilihintir, Terong, Popo, dan Golo Ropong
		Satar Mese	Jaong, Golo Lambo, Ngkaer, Pongkor dan Tal

7	Sungai Wae Koe	Satar Mese	Paka dan Legu
8	Sungai Wae Rii	Rahong Utara	Dimpong, Buar, Bangka Ruang dan Manong
9	Sungai Wae Garit	Langke Rembong	Kel. Golo Dukal dan Kel. Wali
		Ruteng	Kakor dab Benteng Kuwu
		Wae Rii	Lalong, Golo Wua, Golo Watu, Ranggi dan Wae Mulu
		Rahong Utara	Golo Langkok, Liang Bua dan Manong
10	Sungai Wae Kokak	Wae Rii	Golo Cadon Compang Ndehes
		Cibal	Rado
11	Sungai Wae Naong	Cibal	Golo, Pinggang Bea Mese dan Riung
12	Sungai Wae Lega	Rahong Utara	Tengku Lese, Buar dan bangka ruang

Dari beberapa sungai tersebut diatas pada tahun 2021 telah menyebabkan banjir dan mengakibatkan rusaknya fasilitas masyarakat dan fasilitas umum lainnya sejumlah :28 Kejadian

e. Tanah Longsor

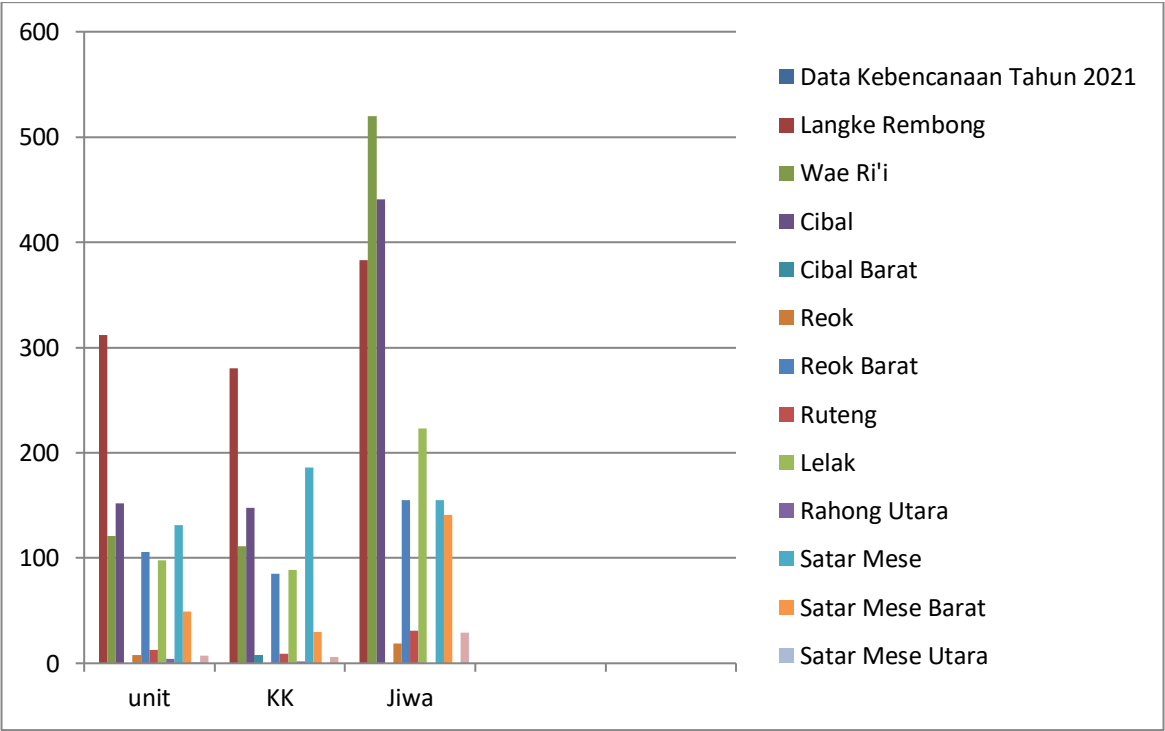
Kabupaten Manggarai berada pada kemiringan tanah sekitar 70.45% dan pada lokasi dengan kemiringan 40⁰. Kondisi tersebut sangat rawan terhadap bencana tanah longsor. Pada tahun 2021 telah menyebabkan Longsor dan mengakibatkan rusaknya fasilitas masyarakat dan fasilitas umum lainnya sejumlah : 305 kejadian

- f. Hujan deras dan angin kencang (*Angin Puting Beliung*)** Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kerentanan terhadap hujan deras dan angin kencang/angin puting beliung. Bencana hujan deras dan angin kencang/angin puting beliung mengakibatkan kerusakan pada fasilitas masyarakat dan fasilitas umum pada tahun 2021 sejumlah : 119 Kejadian
- g. Bencana Kebakaran**
Bencana kebakaran adalah bencana yang setiap tahun dialami di Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2021 (bulan Januari s/d Desember 2021), jumlah kasus kebakaran : 19 kejadian
- h. Bencana Kekeringan**
Bencana kekeringan tahun 2021 melanda seluruh wilayah di Kabupaten Manggarai, bahkan seluruh wilayah NTT, dampak dari kekeringan ini : pada sektor pertanian, peternakan, pengurangan ketersediaan air tanah, potensi terjadinya kebakaran lahan/hutan, dengan luas areal pertanian 0
- i. Bencana Sosial lainnya**
Bencana sosial selama tahun 2021 yang terjadi di Kabupaten Manggarai yaitu : sebanyak : 10 kejadian dengan rincian 7 orang : Tersesat di Hutan , 1 orang tenggelam, 1 orang, tertimpa pohon, 1 orang terbakar.

Berikut adalah tabel jumlah kejadian bencana tahun 2021

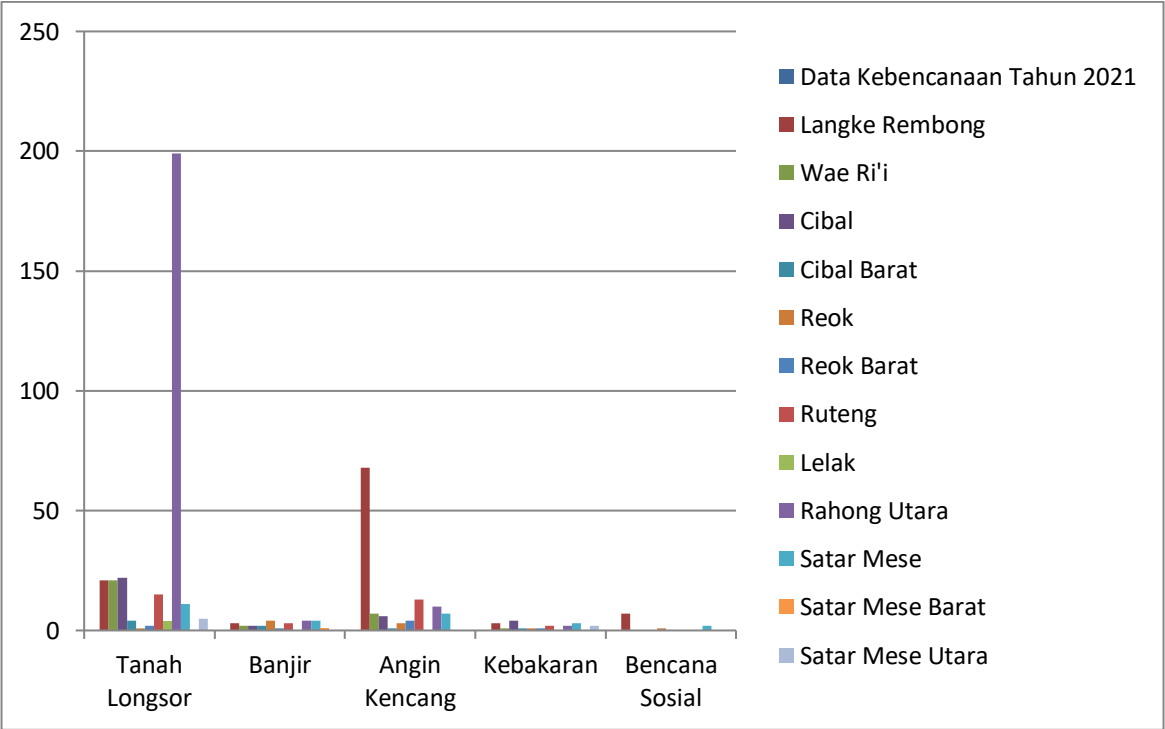
a. Sebaran Kejadian Bencana dan KK, serta Jiwa yang terdampak :

No	Kecamatan	Jumlah Terdampak			
		Unit	KK	Jiwa	Ket
1.	Langke Rembong	312	280	383	-
2.	Wae Ri'i	121	111	520	-
3.	Cibal	152	148	441	-
4.	Cibal Barat	0	8	0	-
5.	Reok	106	85	155	-
6.	Reok Barat	13	9	31	-
7.	Ruteng	98	89	223	-
8.	Lelak	4	2	0	-
9.	Rahong Utara	131	186	155	-
10.	Satar Mese	49	30	141	-
11.	Satar Mese Barat	1	0	0	-
12.	Satar Mese Utara	7	6	29	-
Jumlah		994	954	2078	-



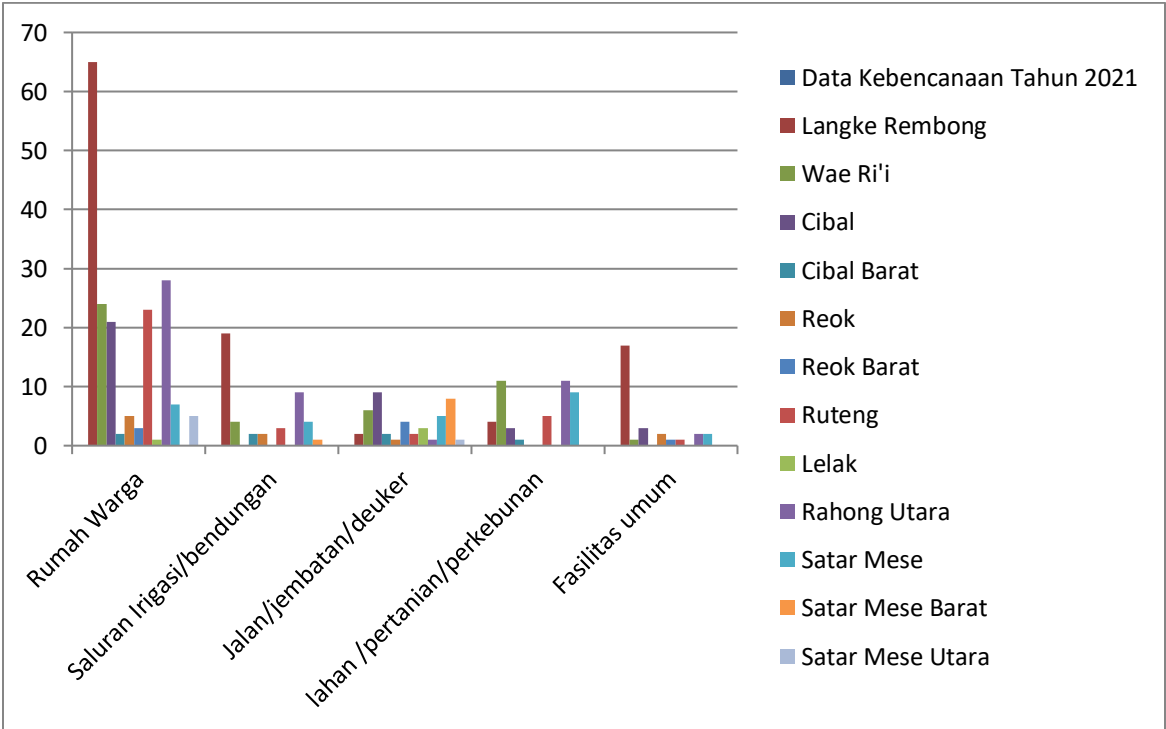
b. Sebaran Jenis Bencana :

No	Kecamatan	Jenis Bencana					
		Tanah Longsor	Banjir	Angin Kencang	Kebakaran	Bencana Sosial	Ket
1.	Langke Rembong	21	3	68	3	7	-
2.	Wae Ri'i	21	2	7	1	0	-
3.	Cibal	22	2	6	4	0	-
4.	Cibal Barat	4	2	1	1	0	-
5.	Reok	1	4	3	1	1	-
6.	Reok Barat	2	1	4	1	0	-
7.	Ruteng	15	3	13	2	0	-
8.	Lelak	4	0	0	0	0	-
9.	Rahong Utara	199	4	10	2	0	-
10.	Satar Mese	11	4	7	3	2	-
11.	Satar Mese Barat	0	1	0	0	0	-
12.	Satar Mese Utara	5	0	0	1	0	-
Jumlah		305	26	119	10	10	-



c. Sebaran Kerusakan Akibat Bencana :

No	Kecamatan	Data Kerusakan Akibat Bencana						
		Rumah Warga	Saluaran Irigasi/ Bendungan	Jalan/ Jembatan/ Deuker	Lahan/ Pertanian/ Perkebunan	Fasilitas Umum	Korban MD	Ket
1.	Langke Rembong	65	19	2	4	17		-
2.	Wae Ri'i	24	4	6	11	1		-
3.	Cibal	21	0	9	3	3		-
4.	Cibal Barat	2	2	2	1	0		-
5.	Reok	5	2	1	0	2	1	-
6.	Reok Barat	3	0	4	0	1		-
7.	Ruteng	23	3	2	5	1		-
8.	Lelak	1	0	3	0	0		-
9.	Rahong Utara	28	9	1	11	2		-
10.	Satar Mese	7	4	5	9	2	2	-
11.	Satar Mese Barat	0	1	8	0	0		-
12.	Satar Mese Utara	5	0	1	0	0		-
Jumlah		164	27	43	44	29	3	-



Status bencana daerah Kabupaten Manggarai adalah :

No	Jenis Bencana	Status	Ket
1	Gempa Bumi	Waspada	
2.	Tsunami	Waspada	
3.	Gunung Api	Normal	Aktif
4.	Banjir	Waspada	
5.	Tanah Longsor	Waspada	
6.	Kebakaran	Waspada	
7.	Kekeringan	Waspada	
8.	Bencana Sosial Lainnya	Waspada	

1.7. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian. LAKIP Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai 2021

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2. Realisasi Anggaran

1. Target dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.
2. Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana dituangkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 yang hendak dicapai oleh organisasi perangkat daerah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 adalah:

VISI

**TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN MANGGARAI DARI ANCAMAN,
RISIKO DAN DAMPAK BENCANA**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut:

MISI

- 1. Mewujudkan Upaya Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Mitigasi Bencana;**
- 2. Mewujudkan Penanganan Darurat Bencana dan Pemulihan Kehidupan Masyarakat secara cepat, tepat, menyeluruh dan akuntabel;**

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk memberikan arah bagi tercapainya visi dan terlaksananya misi, maka ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran strategis dari tiap-tiap misi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun, disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai 2016-2021. Program yang sesuai dengan Tupoksi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai dan keterkaitannya dengan visi, misi dan kebijakan strategis, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi			
Terwujudnya Perlindungan Manggarai dari Ancaman, Risiko dan Dampak Bencana			
Misi			
1. Mewujudkan Upaya Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Mewujudkan Penanganan Darurat Bencana dan Pemulihan Kehidupan Masyarakat secara cepat, tepat, menyeluruh dan akuntabel;			
Mengurangi Risiko dan Dampak Bencana Yang Timbul	Mitigasi	Peningkatan penanggulangan bencana	Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan
Mempercepat Pemulihan Masyarakat Pada Wilayah Pasca Bencana	Tanggap Darurat dan Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian, aset, keuangan dan dokumen penting lain di BPBD kab. Manggarai	Peningkatan penanggulangan bencana	Percepatan pemulihan masyarakat pada wilayah pasca bencana

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai 2021. Sasaran Strategis yang terdapat di Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 yang telah ditandatangani pada awal tahun 2019, masih mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

1. Sasaran Mitigasi mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama, kedua indikator tersebut tidak mencapai target atau 0% dikarenakan tidak ada anggaran dalam melaksanakan program/ kegiatan,
2. Sasaran Tanggap Darurat mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama, rata-rata capaian indikatornya : 100 %
3. Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian, aset, keuangan dan dokumen penting lain di Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Manggarai. mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama, ketiga indikator tersebut mencapai target atau 100%, realisasi keuangannya : 100 %.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

No	sasaran	Indikator	Target Tahun 2021	Jumlah Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021
1.	Mitigasi	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Bencana	80 orang	20.769.000	20.669.000
		Jumlah Lokasi Rawan Bencana Yang Terpasang Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana	10 buah	43.259.000	43.034.500
2.	Tanggap Darurat	% Jumlah Lokasi Bencana Yang Teridentifikasi	12 kec	207.565.648	205.569.020
		% Jumlah Bantuan Bencana Yang Terdistribusi	12 kec	82.134.000	82.134.000
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya	Jumlah Dokumen Yang Terdata Dengan Baik	22 orang	1.000.000	1.000.000
		Jumlah dokumen aset	1 dok	1 dok	100
		Jumlah laporan keuangan	1 dok	1 dok	100

Besarnya alokasi anggaran belanja langsung dalam APBD Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.347.344.126 (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu serratus dua puluh enam rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.255.615.244 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dengan serapan keuangan 96,09% dan fisik 100%.

Berdasarkan dokumen rencana yang ditetapkan berkaitan dengan kebijakan program dan kegiatan, maka pada tahun anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 2 program dan 19 kegiatan.

Tabel
Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Pada Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Daerah	2.347.344.126	2.255.615.244	96,09
2.	Belanja Operasi	2.297.884.126	2.206.396.744	
	Belanja Pegawai	1.650.007.778	1.626.465.644	98,57
	Belanja Barang dan Jasa	647.876.348	579.931.100	89,51
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
3.	Belanja Modal	49.460.000	49.218.500	99,51
Total		2.347.344.126	2.255.615.244	96,09



3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai. Capaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi

76 % ≤ 90 % Tinggi

66 % ≤ 75 % Sedang

51 % ≤ 65 % Rendah

≤ 50 % Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai telah menetapkan 7 (tujuh) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2021, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2021 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2021 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1. Pengukuran Kinerja BPBD tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Mitigasi	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Bencana	80 orang	80 orang	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Lokasi Rawan Bencana Yang Terpasang Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana	10 buah	10 buah	100	Sangat Tinggi
2.	Tanggap Darurat	% Jumlah Lokasi Bencana Yang Teridentifikasi	12 kec	12 kec	100	Sangat Tinggi
		% Jumlah Bantuan Bencana Yang Terdistribusi	12 kec	12 kec	100	Sangat Tinggi
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya	Jumlah Dokumen Yang Terdata Dengan Baik	3 dok	3 dok	100	Sangat Tinggi
		Jumlah dokumen aset	1 dok	1 dok	100	Sangat Tinggi
		Jumlah laporan keuangan	1 dok	1 dok	100	Sangat Tinggi

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir;

Setelah diperoleh perbandingan antara target dan realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 dengan Tahun 2020. Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.

Pengukuran kinerja BPBD Kab. Manggarai Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Mitigasi	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Bencana	80 orang	80 orang	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Lokasi Rawan Bencana Yang Terpasang Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana	10 buah	10 buah	100	Sangat Tinggi
2.	Tanggap Darurat	% Jumlah Lokasi Bencana Yang Teridentifikasi	12 kec	12 kec	100	Sangat Tinggi
		% Jumlah Bantuan Bencana Yang Terdistribusi	12 kec	12 kec	100	Sangat Tinggi
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya	Jumlah Dokumen Yang Terdata Dengan Baik	3 dok	3 dok	100	Sangat Tinggi
		Jumlah dokumen aset	1 dok	1 dok	100	Sangat Tinggi
		Jumlah laporan keuangan	1 dok	1 dok	100	Sangat Tinggi

Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Mitigasi	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Bencana	-	-	-	Sangat Rendah
		Jumlah Lokasi Rawan Bencana Yang Terpasang Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana	-	-	-	Sangat Rendah
2.	Tanggap Darurat	% Jumlah Lokasi Bencana Yang Teridentifikasi	12 kec	12 kec	100	Sangat Tinggi
		% Jumlah Bantuan Bencana Yang Terdistribusi	12 kec	12 kec	100	Sangat Tinggi
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya	Jumlah Dokumen Yang Terdata Dengan Baik	22 orang	22 orang	100	Sangat Tinggi
		Jumlah dokumen aset	1 dok	1 dok	100	Sangat Tinggi
		Jumlah laporan keuangan	1 dok	1 dok	100	Sangat Tinggi

3.1.3. **Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;**

Realisasi kinerja Tahun 2021 adalah pelaksanaan kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kab. Manggarai Tahun 2016-2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator	Target Sd 2020	Realisasi sd 2020	Ket.
1	Mitigasi	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Bencana	-	-	
		Jumlah Lokasi Rawan Bencana Yang Terpasang Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana	-	-	
2.	Tanggap Darurat	% Jumlah Lokasi Bencana Yang Teridentifikasi	12 kec	12 kec	
		% Jumlah Bantuan Bencana Yang Terdistribusi	12 kec	12 kec	
3.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Lokasi Yang Tertangani Akibat Bencana	-	-	
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya	Jumlah Dokumen Yang Terdata Dengan Baik	22 orang	22 orang	100
		Jumlah dokumen aset	1 dok	1 dok	100
		Jumlah laporan keuangan	1 dok	1 dok	100

3.1.4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**
Standar nasional

Realisasi kinerja untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya.

3.1.5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Penetapan Kinerja, yaitu dengan membandingkan dengan target dan realisasi yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja.

Pada Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1.	Tanggap Darurat	% Jumlah Lokasi Bencana Yang Teridentifikasi	12 kec	100
		% Jumlah Bantuan Bencana Yang Terdistribusi	12 kec	100
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya	Jumlah Dokumen Yang Terdata Dengan Baik	22 orang	100
		Jumlah dokumen aset	1 dok	100
		Jumlah laporan keuangan	1 dok	100

Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2019 telah mencapai target, yaitu memperoleh predikat BB (sangat baik, akuntabel berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang handal) dengan nilai 74,05 (BB) Sangat Baik. Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai berfluktuasi sesuai dengan akumulasi penilaian evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Kinerja. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai untuk 1 (tahun) tahun terakhir juga telah mencapai target. Kategori penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai sangat baik, akuntabel berkinerja baik, dan memiliki manajemen kinerja yang handal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari 2 (dua) misi diatas adalah dukungan dana yang cukup untuk bisa menjawab pencapaian indicator kinerja.

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari program dan kegiatan diatas adalah dukungan dana yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung selanjutnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.1

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian Kinerja	Anggaran 2021		% Capaian Keuangan	Sisa Anggaran	Rincian Masalah
						Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal	1 Tahun	1 tahun	100	1.993.616.478	1.904.208.724	95,51	89.407.904	
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100					Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ & LPPD	3 jenis	3 jenis	100	1.000.000	1.000.000	100		
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	1.650.457.778	1.626.465.644	98,54		Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 tahun	100	1.616.507.778	1.592.515.644	98,51	23.992.134	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor pengelola APBD	10 orang	10 orang	100	33.950.000	33.950.000	100		
3.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	113.503.700	112.613.700	99,21		Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	6 jenis	100	2.000.000	2.000.000	100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58 jenis	58 jenis	100	29.787.000	29.787.000	100		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5124 om	5124 om	100	27.720.000	27.720.000	100		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	12.417.700	12.417.700	100		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2 jenis	50	1.680.000	840.000	50	840.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material	Tersediabnya Bahan / Material	11 jenis	11 jenis	100	999.0000	999.0000	100		
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	3 kali	3 kali	99,87	38.900.000	38.850.000	99,87	50.000	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	19.460.000	19.460.000	100		
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin	2 jenis	2 jenis	100	19.460.000	19.443.000	99,86	17.000	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	54.800.000	25.524.000	46,60		Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	44,11	3.400.000	1.500.0000	44,11	1.900.000	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	46,73	51.400.000	24.024.000	46,73	27.376.000	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	154.395.000	119.162.380	77,18		Kegiatan terlaksana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 unit	21 unit	77,04	146.720.000	113.043.880	77,04	33.676.120	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin.	7 jenis	7 jenis	79,71	7.675.000	6.118.500	79,71	1.556.500	
II	Program Penanggulangan Bencana	Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Tahun	1 Tahun	100	353.727.648	351.406.520	99,42	2.321.128	
1.	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	1 Tahun	1 Tahun	100					Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ancaman, risiko dan dampak bencana	80 orang	80 orang	100	20.769.000	20.669.000	99,51	100.000	
2.	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Tahun	1 Tahun	100					Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	Terpasangnya Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana	10 buah	10 buah	100	43.259.000	43.034.500	99,48	224.500	
3.	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Tahun	1 Tahun	100					Kegiatan terlaksana
	Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	Tersedianya data dan Laporan	12 kec	12 kec	100	207.565.648	205.569.020	99,04	1.996.628	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Terdistribusinya Bantuan Tanggap darurat bagi korban bencana	12 kec	12 kec	100	82.134.000	82.134.000	100		
	TOTAL					2.347.344.126	2.255.615.244	96,09	91.728.882	

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Target dan realisasi belanja operasi dan belanja modal

No	Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Belanja Operasi	2.297.884.126	2.206.396.744	96,01%
2.	Belanja Modal	49.460.000	49.218.500	99,51%
Total		2.347.344.126	2.255.615.244	96,09%

3.2.2. Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Mitigasi	64.028.000	63.703.500	99,43%
2.	Tanggap Darurat	289.699.648	287.703.020	99,31%
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya	1.000.000	1.000.000	100 %
		216.132.370	216.123.700	100%

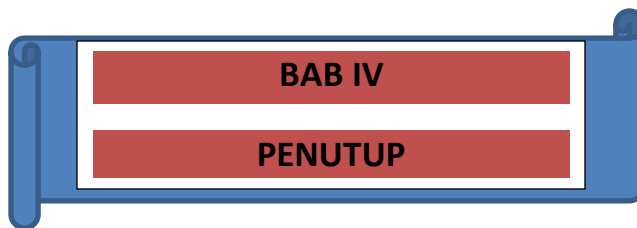
3.2.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran mitigasi : % rata – rata capaian kinerjanya 100 %, antara anggaran dan realisasinya : 100 % (efisien)
- Sasaran Tanggap Darurat : % rata – rata capaian kinerjanya 100 %, antara anggaran dan realisasinya : 100 % (efisien)
- Sasarana Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya : 100% rata – rata capaian kinerjanya 100 %, antara anggaran dan realisasinya : 100 % (efisien)

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	% rata-rata capaian kinerja sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% realisasi anggaran	Ket.
1	Mitigasi	100	64.028.000	63.703.500	99,43	Efisien
2	Tanggap Darurat	100	289.699.648	287.703.020	99,31	Efisien
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya	100	1.000.000	1.000.000	100	Efisien



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai

6.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2021 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 dan telah memenuhi sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai dapat dinyatakan cukup berhasil. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan pada tahun berikutnya. Kekurangan yang ada di Tahun 2021 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun berikutnya. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya

6.2. KENDALA DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: 1. Seluruh program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai belum seluruhnya selaras dengan sasaran strategis pembangunan yang ditetapkan; 2. Hasil evaluasi laporan daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya. 3. Kurangnya dukungan anggaran kepada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai.

3.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut: 1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai; 2. Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan; 3. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan; 4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang kebencanaan; 5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif; 7. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan disemua bidang/sector baik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, seperti Badan Pusat Statistik.

Demikian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 disusun untuk dijadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Ruteng, 15 Pebruari 2022



